

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan renstra Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini juga dipertegas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 telah berakhir dan berakhirnya masa jabatan Walikota Tebing Tinggi, sehingga sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 pada diktum kesatu ayat (b) bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi merupakan tindak lanjut dari telah disusunnya Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kota Tebing Tinggi, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi tahun 2023 – 2026. Perencanaan Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1

(satu) sampai 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2023-2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2023-2026 akan lebih memfokuskan dalam pengembangan pertanian perkotaan melalui pembangunan kluster agrowisata, pengembangan penangkar benih tanaman pangan, pengolahan hasil-hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan dengan mutu tinggi, Pengembangan SDM Penyuluh dan Petani, Penguatan kelembagaan petani serta pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi juga telah memperhatikan fokus Renstra Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang akan berakhir pada Tahun 2024 nanti. Hal yang sama juga dilakukan sinkronisasi terhadap Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026
15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi
16. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan dan Pertanian ini dimaksudkan untuk:

- a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
- b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPD Kota Tebing Tinggi dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi.
- c) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 4 (empat) tahun mendatang dalam urusan Pangan, pertanian dan perikanan dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka

panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

- a) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi.
- b) Memberikan arah dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kota Tebing Tinggi, dan penentuan isu-isu strategis di unsure kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama 4 (empat) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 4 (empat) tahun

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk periode 2023-2026.

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan dan penyuluhan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, penyuluhan dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan dan penyuluhan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan dan penyuluhan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan dan penyuluhan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan dan penyuluhan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. 2 (dua) Sub Koordinator.
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 - a. 3 (Tiga) Sub Koordinator;
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :

didukung dengan jumlah ASN sebanyak 69 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 58 orang yang dibagi sesuai dengan bidang tugas masing – masing. Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut :

A. Berdasarkan Jenjang Jabatan

Susunan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi berdasarkan jenjang jabatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1

Susunan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

No.	Uraian	Jumlah	Terisi	Kosong
1.	Pejabat Struktural			
	• Eselon II	1	1	0
	• Eselon III	7	7	0
	Jumlah	8	8	0
2	Pejabat Fungsional			
	• Pejabat Fungsional/Sub Koordinator	20	18	2
	• Ajun Penyuluh Pertanian Madya	2	2	0
	• Ajun Penyuluh Penyelia	3	3	0
	Jumlah	25	23	2

Dari tabel 1.4.1. diatas dapat dilihat bahwa untuk jabatan struktural, saat ini dari 33 jabatan yang ada yaitu jabatan struktural eselon II sebanyak 1 jabatan (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian), Eselon III sebanyak 7 jabatan (Sekretaris, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kabid Persediaan dan Distribusi Pangan, Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kabid Prasarana, sarana dan Penyuluhan dan kabid Perikanan), dan eselon IV sebanyak 25 jabatan semuanya telah terisi. Untuk jabatan fungsional terdiri dari Ajun Penyuluh Pertanian Madya sebanyak 3 orang dan Ajun Penyuluh Pertanian sebanyak 2 orang. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta dalam pemberian layanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

B. Berdasarkan Strata Pendidikan

Susunan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing

Tinggi berdasarkan klasifikasi Pendidikan Formal ASN selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.2
Susunan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Uraian	Jumlah
1.	S2	3 Orang
2.	S1	46 Orang
3.	D3	10 Orang
4.	D1	0 Orang
5.	SLTA	12 Orang
6.	SLTP	0 Orang
7.	SD	0 Orang
Jumlah		71 Orang

Dari aspek pendidikan sebagaimana terlihat pada tabel 1.4.2. diatas, kondisi SDM di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara umum sudah baik dimana pegawai lulusan perguruan tinggi (D3, S1 dan S2) mencapai 29 orang atau 69 % yang didominasi oleh lulusan S1 yakni sebanyak 51 orang. Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang tingkat SDM di Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian akan semakin meningkat tidak hanya secara kuantitas tetapi lebih kepada peningkatan kualitas yang dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa pendidikan bagi tamatan SMA kebawah ke jenjang yang lebih tinggi dan pelatihan-pelatihan kedinasan baik dalam daerah maupun di luar daerah.

C. Berdasarkan Golongan

Susunan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi berdasarkan golongan dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel2.2.3.
Susunan Pegawai Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian KotaTebing Tinggi
Berdasarkan Golongan.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Golongan IV	5 Orang
2.	Golongan III	49 Orang
3.	Golongan II	17 Orang
4.	Golongan I	0 Orang
Jumlah		71 Orang

Dilihat dari tingkat golongan, pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian lebih didominasi oleh Golongan III yang ditandai dengan jumlah pegawai lulusan S1 yang lebih banyak. Dengan demikian kondisi SDM di Dinas Pertanian sudah cukup memadai. Ada harapan agar pegawai yang sudah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan struktural tertentu untuk di promosikan sebagai apresiasi bagi para pegawai untuk meniti karirnya.

Dalam menjalankan tugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi juga didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dan dalam kondisi baik meliputi :

- Peralatan/perlengkapan gedung kantor (Komputer, laptop, printer, meja kerja, kursi kerja, meja rapat, kursi rapat, lemari arsip, kursi tamu/sofa, filing kabinet, AC, Kipas angin, Genset, infokus, layar infokus, camera, mesin penghancur kertas, dan lain-lain)
- Peralatan/perlengkapan Laboratorium kultur jaringan
- Peralatan/perlengkapan Pertanian
- Peralatan/perlengkapan Pembibitan/benih Ikan
- Peralatan/perlengkapan Pemeliharaan Kesehatan Hewan
- Peralatan/perlengkapan Pengawasan Keamanan Pangan
- Peralatan/perlengkapan Rumah Potong Hewan
- Kendaraan Dinas Roda 4, Kendaraan Dinas Roda 3 dan Kendaraan Dinas Roda 2

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan dan penyuluhan. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya. Rincian tentang pencapaian kinerja pelayanan, anggaran dan realisasi anggaran Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Reformasi Birokrasi				68	69	70	75	78	68	69	70	75	78	100	100	100	100	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat				78,71	79	80	80	80,5	79	79	80,76	82,81	81	100,37	100	100,95	103,51	100,62
2	Kecukupan kebutuhan bulanan barang kebutuhan pokok (beras, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, daging sapi)				94,30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	106,04	100	100	100	100
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				67	74	75	78	80	71	71	72,1	71,1	81	105,970 1	95,95	96,13	91,15	101,25

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan				3%	3%	3%	3%	3%	3%	4,09	3,38	2,32	0,57	100	13633,33	11266,67	7733,33	1900
	Produktifitas																		
	- Padi (GKP) (kw/ha)				64	65	66	67	68	63	62	64.5	70	68	98,44	95,38	4,05	103,99	100
	- Jagung (kw/ha)				51	52	53	54	55	50	49	64	57	55	98,04	94,04	120,75	104,63	100
	- Kacang Tanah (kw/ha)				15	15	15	16	16	15	12	-	-	16	100	78	-	-	100
	- Ubi Kayu (kw/ha)				500	520	550	550	600	520	406	418	470	60	104	78,13	75,93	85,4	10
	- Ubi Jalar (kw/ha)				120	120	120	120	120	169	115	-	100	12	140,9167	95,83333	0	83,33	10
	- Bawang merah (kw/ha)				50	50	60	60	60	12	20	80.9	48	60	23,6	39,34	5,57	79,45	100
	- Cabe merah (kw/ha)				73	73	74	74	75	122	29	11.25	55	75	167,55	39,04	0,64	74,18	100
	- Sawi (kw/ha)				32	33	34	35	36	31	29	22.5	32	36	97,34	89,03	2,71	90,71	100
	- Kangkung (kw/ha)				34	35	36	37	38	31	28	31.2	32	38	92,53	79,20	3,59	85,81	100
	- Bayam (kw/ha)				42	43	44	45	46	30	22	22.3	34	46	70,88	50,81	2,09	75,00	100
	Persentase meningkatnya populasi ternak :																		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	- Sapi Perah (ekor)				60	66	73	81	90	64	66	70	72	74	106,67	100	95,89	88,89	82,22
	- Kambing (ekor)				5.850	6.435	7.080	7.790	8.600	7.150	6.431	6.741	6.875	7.025	122,22	99,94	95,21	88,25	81,69
	- Domba (ekor)				6.100	6.200	6.350	6.550	6.800	7.190	6.121	6.390	6.570	6.720	117,87	98,73	100,63	100,31	98,82
	Persentase meningkatnya produksi olahan hasil ternak :																		
	- susu ternak (Liter)				200.000	20.500	21.100	21.800	22.600	3.600	8.760	4.968	5.040	23.000	1,8	42,73	23,55	23,12	101,7699
	- daging ternak (ton/tahun)				122	130	139	149	160	233	172	176	181	200	190,98	132,31	126,62	121,48	125
	Persentase meningkatnya produksi ikan:																		
	a. Produksi ikan air tawar																		
	- Ikan Mas (ton)				145	154	166	174	193,10	145	152	369,79	375,79	229,17	100	98,70	222,77	215,97	118,68
	- Ikan Nila (ton)				1.090	1.161	1.238	1.322	1.412	1.090	1.158	1109,40	1129,68	1237,58	100	99,74	89,61	85,45	87,65
	- Ikan Lele (ton)				1.522	1.620	1.724	1.840	1.970	1.522	1.615	1505,60	1535,65	1783,30	100	99,69	87,33	83,46	90,52
	- Ikan Gurami (ton)				47	50	53,20	56,70	60,50	47	49,00	36,54	37,16	39,56	100	98	68,68	65,54	65,39
	- Ikan Patin (ton)				18	48	20,10	21,30	32,60	18	19,00	19,97	20,35	21,46	100	39,58	99,35	95,54	65,83
	b. Produksi																		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Benih Ikan Air Tawar :																		
	- Ikan Mas (ekor)				529.000	556.000	584.910	616.790	2.100.000	528.930	542.100	602.037	606.734	638.444	99,99	97,5	102,93	98,37	30,40
	- Ikan Nila (ekor)				1.313.000	1.380.000	1.451.760	1.533.330	1.619.670	1.313.223	1.375.000	1.391.716	1.409.386	1.488.453	100,02	99,63768	95,86	91,92	91,90
	- Ikan Lele (ekor)				3.118.000	3.280.000	3.460.000	3.659.370	3.878.930	3.117.960	3.264.000	3.296.400	3.343.423	3.550.831	100,00	99,5122	95,27	91,37	91,54
	- Ikan Gurami (ekor)				80.000	84.000	88.000	93.760	99.390	79.894	80.950	81.863	92.114	97.464	99,87	96,36905	93,03	98,24	98,06
	- Ikan Patin (ekor)				4.000	4.200	4.430	4.680	4.960	4.292	4.165	9.298	9.447	10.627	107,30	99,16667	209,89	201,86	214,25
	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Organik di Cluster Agrowisata				-	10%	20%	100%	100%	-	-	83,66%	100%	100%	-	-	418,3	100	100
	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani pada Cluster Agrowisata				-	10%	10%	10%	10%	-	-	12,28%	18,97%	23,36%	-	-	122,8	189,7	233,6

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	4.746.590.000	5.262.384.000	5.553.370.000	5.583.902.145	13.019.335.608	4.603.463.757	5.138.866.937	5.260.779.064	5.162.848.853	12.684.778.333	96,98 %	97,65 %	94,73 %	92,46 %	97,43 %	38%	31%
Belanja Langsung	10.372.452.453	17.260.121.500	15.491.108.498	4.495.435.089		10.318.480.126	16.919.899.774	14.485.315.963	4.283.101.831		99,48 %	98,03 %	93,51 %	95,28 %		-5%	-7%
TOTAL	15.119.042.453	22.522.505.500	21.044.478.498	10.079.337.234	13.019.335.608	14.921.943.883	22.058.766.711	19.746.095.027	9.445.950.684	12.684.778.333	98,23 %	97,84 %	94,12 %	93,87 %	97,43 %	4,9 %	4,9 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

A. Tantangan

1. Sebagai wilayah perkotaan mengakibatkan keterbatasan Keterbatasan Lahan Pertanian dan Peternakan;
2. Berkurangnya minat generasi muda untuk bertani dan beternak
3. Beternak masih dijadikan usaha sampingan bukan sebagai mata pencarian masyarakat.
4. Kepemilikan lahan yang terbatas sehingga berpengaruh pada tingkat pengolahan lahan, pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang terus menerus setiap tahunnya menjadi pemukiman.
6. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh petani dalam upaya pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan.
7. Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
8. Potensi banjir kiriman yang terkadang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha pertanian, perikanan dan peternakan.
9. Kurangnya Penerapan Teknologi Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
10. Masih kurangnya jumlah tenaga penyuluh sesuai disiplin ilmu yang dimiliki
11. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyuluh pertanian
12. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
13. Belum adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

B. Peluang

1. Masih tingginya kebutuhan produk hewan di Kota Tebing Tinggi
2. Teknologi yang semakin dikenal masyarakat memicu keinginan masyarakat untuk beternak terutama generasi muda
3. Beternak sebagai usaha yang mempunyai prospek dalam upaya sebagai mata pencaharian pokok

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat empat tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian empat tahun mendatang. Selain itu perumusan isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi periode 2023-2026 juga berdasarkan pada telaahan KLHS serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG's).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi

Setelah RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 berakhir, masih banyak persoalan pembangunan yang harus diselesaikan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan masih ada yang belum sejalan dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Sehingga hakikatnya tujuan tersebut masih belum optimal. Ketidakoptimalan ini untuk diminimalisir seefisien mungkin untuk Program dan kegiatan serta sub kegiatan pada periode mendatang yang nantinya apabila sesuai dengan tujuan maka akan berdampak pada penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi. Perjanjian kinerja Kepala Dinas terhadap Walikota merupakan tolak ukur untuk penetapan perjanjian kinerja turunan kepala bidang serta kepala seksi masing-masing bidang, sehingga kegiatan dan sub kegiatan yang akan direncanakan memiliki kesesuaian terhadap tujuan yang ingin dicapai yang nantinya akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Kuranginya kuantitas dan kualitas aparatur pada bidang pertanian, peternakan dan perikanan	Masih kurangnya sumber daya kelompok petani, penyuluh pertanian dalam peningkatan produksi hasil pertanian serta penanganan hama dan penyakit tanaman	Keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi para petani dan penyuluh pertanian
	Kuranginya sumber daya manusia di dalam penanganan kesehatan dan penyakit hewan ternak	Kuranginya tenaga medik veteriner dan paramedik
	Kuranginya petugas kesehatan hewan dan daging, sarana dan prasarana pendukung pada Rumah Potong Hewan	Perlunya penempatan petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging pada saat ante dan post mortem, serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pada Rumah Potong Hewan
	Kualitas SDM pembudidaya ikan, petugas pada bidang perikanan masih kurang	Kuranginya pelatihan SDM pembudidaya ikan
Kepemilikan lahan yang terbatas sehingga berpengaruh pada tingkat pengolahan lahan, pendapatan dan kesejahteraan petani	Terbatasnya komoditi pertanian unggulan yang dikelola oleh para kelompok tani	Keterbatasan lahan
Potensi banjir kiriman yang terkadang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha pertanian, perikanan dan peternakan	Menurunnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di kawasan yang berpotensi banjir	Terjadinya genangan akibat banjir kiriman dari daerah hulu
Kuranginya penerapan teknologi pertanian peternakan	Terbatasnya variasi tanaman dan kualitas tanaman hasil kultur jaringan	Kuranginya Kualitas SDM tenaga teknis laboratorium kultur jaringan yang berlatar belakang pendidikan kultur jaringan
	Belum optimalnya jumlah benih ikan yang dihasilkan di BBI	Kuranginya sarana dan prasarana pendukung produksi benih ikan

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Masih minimnya pengolahan dan pemasaran produk dari hulu ke hilir untuk komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan deripat turunannya untuk meningkat nilai tambah produk dan tambahan pendapatan masyarakat/kelompok tani	Belum terintegrasinya penanganan pertanian dari hulu sampai hilir di kawasan kluster agrowisata terintegrasi	Perlunya perencanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dengan melibatkan organisasi perangkat daerah teknis yang mendukung pembangunan kluster agrowisata terintegrasi
	Belum optimalnya produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Masih kurangnya sarana prasarana pendukung produksi dan produktivitas pertanian (alsintan, pupuk, pestisida, irigasi, jalan usaha tani/produksi)
	Belum terkoordinirnya manajemen pemasaran hasil pertanian/ peternakan/ perikanan	Belum adanya badan usaha milik daerah (BUMD) yang dikelola oleh pemerintah/swasta/kelompok tani
	Kurangnya pengetahuan peternak dalam pengolahan dan pemasaran hasil ternak	Perlunya pendidikan dan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil ternak
	Tingginya biaya produksi budidaya ikan air tawar	Tingginya harga pakan ikan
	Masih rendahnya nilai ekonomis hasil produksi perikanan	Minimnya pengetahuan para pembudidaya ikan dan pengolah hasil produksi perikanan yang berorientasi pasar
	Belum adanya keseragaman harga produk pangan pokok lokal dengan daerah hinterland	Belum ditetapkannya harga minimum pangan pokok lokal
Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyuluh pertanian	Belum optimalnya penanganan permasalahan di lingkup petani karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyuluh pertanian	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung penyuluh pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian
	Masih terbatasnya pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan oleh petugas	Terbatasnya sarana dan prasarana petugas inseminasi buatan dalam memberikan pelayanan kepada peternak
	Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman	Masih rendahnya pendapatan per kapita masyarakat
Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh petani dalam upaya pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan	Kurangnya pengetahuan peternak tentang kualitas/mutu pakan ternak	Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi para peternak

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian/Kementerian Kelautan/Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera/Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Dalam merumuskan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategis kementerian/lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian. Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, maka ditetapkan Visi Kementerian Pertanian, yaitu : Visi Kementerian Pertanian dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024 adalah “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Terwujudnya reformasi birokrasi

Kementerian Pertanian Selama lima tahun ke depan (2020-2024), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian menetapkan 6 (enam) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian.
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan

7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianyaprasarana dan sarana pertanian,
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program-program.

Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024 yaitu:

1. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional Kondisi yang ingin adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan.
2. Strategi dalam meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dandaya saing produk pertanian.

3. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian
Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian.
4. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian Pengembangan SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangkapelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdayasaing tinggi dan berkelanjutan.

3.2.2. Program Kementerian Pertanian

Berdasarkan Kerangka Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024, Program-program yang berkaitan dengan subsektor tanaman pangan dan hortikultura yaitu :

No.	Program	Sasaran Program
1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis tanaman pangan 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian tanaman pangan 3. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan yang sesuai dengan kebutuhan 4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman pangan
2.	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan komoditas strategis hortikultura 2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian 3. Penyediaan sarana hortikultura sesuai kebutuhan 4. Terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura
3.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan
4.	Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian

3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2020-2024 pada prinsipnya mendukung Prioritas Program 3 yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Program ini terdiri dari kegiatan prioritas yaitu :

1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan
2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok
3. Peningkatan produktivitas, keberlanjutan sumber daya manusia (SDM) pertanian dan kepastian pasar
4. Peningkatan produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian
5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pembangunan nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terjaganya ketersediaan pangan strategis nasional. Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketersediaan pangan strategis nasional yaitu meningkatnya produksi tanaman pangan khususnya padi, jagung, kedelai dan aneka umbi, stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah dan distribusi pangan yang lancar.
2. Pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi petani Di Kementerian Pertanian telah dikategorikan kawasan yaitu kawasan Pertanian utama, andalan, dan pengembangan yang dijadikan sebagai calon lokasi major project kawasan pertanian. Komoditas tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar.
3. Peningkatan penggunaan benih bersertifikat
4. Peningkatan ekspor subsector tanaman pangan

Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2020- 2024 yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis tanaman pangan Meningkatkan ketersediaan pangan strategis tanaman pangan dengan melalui pendekatan peningkatan produksi khususnya komoditas padi, jagung dan kedelai. Peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian melalui penyediaan benih unggul peningkatan sertifikasi perbenihan, penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan secara baik (Good Agricultural Practice). Strategi Peningkatan produksi tanaman pangan dengan meningkatkan produktivitas dan luas panen. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah luas lahan intensifikasi/optimalisasi melalui penggunaan benih

unggul/bermutu/bersertifikat, pemupukan berimbang, pengendalian OPT dan DPI. Peningkatan luas panen melalui peningkatan luas lahan ekstensifikasi/perluasan areal pertanian.

2. Peningkatan daya saing tanaman pangan

Peningkatan daya saing dengan mengurangi kehilangan susut hasil dengan penanganan panen dan pasca panen yang benar (Good Handling Practice), Peningkatan mutu dan daya saing dengan pengolahan yang benar (Good Manufacturing Practice)

3. Peningkatan infrastruktur pertanian pasca panen

Penggunaan alsintan Pasca panen dimaksudkan untuk peningkatan produksi loses dan mutu hasil tanaman pangan.

3.2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hortikultura

Kebijakan pembangunan hortikultura tahun 2020-2024 adalah meningkatkan daya saing hortikultura yang mendorong peningkatan produksi, peningkatan akses pasar dan ekspor didukung oleh budidaya ramah lingkungan berkelanjutan serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk peningkatan kesejahteraan petani. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, diperlukan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan hortikultura. Strategi pembangunan hortikultura tahun 2020-2024 adalah:

1. Pemantapan stabilisasi pasokan komoditas strategis dilakukan dengan membentuk kawasan-kawasan baru yang menjadi pilar pasokan di wilayah baru terutama di luar Pulau Jawa. Penumbuhan kawasan baru tersebut telah mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga cabai dan bawang merah dan menekan inflasi dengan cukup efektif
2. Peningkatan Pasokan Komoditas Unggulan
3. Pengembangan tanaman obat berdaya saing
4. Penguatan sistem perbenihan berdaya saing
5. Smart and Integrated Farming
6. Penguatan sistem perlindungan ramah lingkungan dan antisipasi dampak perubahan iklim

3.2.5. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian R.I

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Kementerian Pertanian akan fokus pada peningkatan produksi pangan

pokok strategis padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi. Upaya memantapkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan pokok dari produksi dalam negeri, dihadapkan pada permasalahan antara lain:

1. konversi lahan pertanian yang terus berlanjut karena perkembangan industri dan lokasi pemukiman;
2. perluasan lahan yang terkendala baik kualitas tanah maupun kepemilikan lahan di luar jawa;
3. perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; dan
4. agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

Sementara itu, situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan di dalam negeri. Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ketahanan pangan tersebut, Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan berperan secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.

3.2.6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian R.I

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan peternakan dan keswan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan: visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan Good Breeding dan Good Farming Practises. Good Breeding Practises dan Good Farming Practises adalah pelaksanaan usaha peternakan dibidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik

mengikuti standar yang berlaku. Good Breeding Practises dan Good Farming Practises meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit; pelestarian lingkungan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan. Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a) Penyelenggaraan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan.
 - b) Penyediaan pakan yang cukup dan berkualitas berbasis bahan pakan lokal.
 - c) Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan Kesehatan hewan. Peningkatan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk dari proses pengolahan hingga pemasaran peternakan. Daya saing merupakan keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang dimiliki produk hewan nasional terhadap produk hewan negara lain. Peningkatan pada dua aspek nilai tambah dan daya saing akan memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional dari sektor pertanian. Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:
- a) Pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.
 - b) Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan
3. Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan zoonosis; penjaminankeamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan higie dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana. Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:
- a) Meningkatkan kesehatan hewan untuk kesehatan manusia.
 - b) Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.
4. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan berdasarkan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan road map Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi

Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Strategi pelaksanaan dilakukan melalui Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Arah kebijakan Kementerian Pertanian yang berkaitan langsung dengan rumusan kebijakan Ditjen PKH yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

3.2.7. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah :

- a) Penguatan Pendidikan Vokasi pertanian;
- b) Penguatan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- c) Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
- d) Penguatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan SDM pertanian, maka fokus Badan PPSDMP dalam upaya pencapaian target pembangunan pertanian adalah dengan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian melalui penguatan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) berbasis teknologi informasi, yang mengintegrasikan komponen gerakan secara optimal meliputi pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh pertanian dalam arti luas, petugas teknis pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya, serta tenaga kerja sektor pertanian yang berdaya saing dan berjiwa wirausaha yang tinggi melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian adalah:

- a) Pengembangan pelatihan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
- b) Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
- c) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- d) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kompetensi
- e) Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi

3.2.8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab terhadap pencapaian Misi 1 : "Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat

dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau" dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat; Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui Tujuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yaitu Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara. Adapun Sasarannya adalah meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing. Strategi yang dilaksanakan adalah:

- 1) Peningkatan Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Pangan, Perikanan Dan Energi Pedesaan.
- 2) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pertanian
- 3) Peningkatan Akses Hilirisasi Produk Pertanian

Arah Kebijakan:

- 1) Mempertahankan swasembada beras dan jagung;
- 2) Meningkatnya capaian produksi padi, jagung, cabai merah, bawang putih dan bawang merah
- 3) Pembangunan infrastruktur Pertanian
- 4) Memberikan Jaminan Penetapan Harga Komoditi Pertanian yang Layak

Sejalan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yaitu Prioritas ke-4 : Peningkatan Daya Saing Sektor Agraris, yang tertuang dalam perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, terdapat 4 (empat) komoditas strategis pangan utama yang menjadi fokus pencapaian swasembada pangan yaitu beras, jagung, cabai dan bawang merah sampai dengan akhir RPJMD di tahun 2023. Untuk mendukung target tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan 5 (lima) komoditas tanaman pangan dan hortikultura strategis yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis yang menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian swasembada pangan di Provinsi Sumatera Utara yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah dan Cabai. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, beberapa kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan umum pembangunan pertanian Sumatera Utara yang dilakukan yaitu :

- 1) Kebijakan pengembangan produk berdaya saing
- 2) Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, teknologi dan penyuluhan
- 3) Kebijakan pengembangan kawasan pertanian
- 4) Kebijakan fokus komoditas strategis
- 5) Kebijakan pemantapan sistem penyuluhan pertanian

- 6) Kebijakan sistem perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 7) Kebijakan sistem pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura
- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai tujuan Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan sasaran yang akan dicapai meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat. Strategi yang dilaksanakan adalah

3.2.9. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan sasarannya adalah meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat, strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah:
 - a. Pengembangan diversifikasi pangan
 - b. Penanganan diversifikasi pangan
 - c. Stabilisasi harga dan pasokan pangan
 - d. Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

Arah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas adalah Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pemanfaatan potensi sumber daya lokal

2. Peningkatan kesejahteraan petani sektor peternakan dan sasarannya adalah Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan dengan strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan peternakan berbasis korporasi petani
 - b. Peningkatan perbibitan ternak
 - c. Pengembangan pakan ternak
 - d. Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
 - e. Penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan

Arah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas adalah Mengefisienkan nilai yang dikeluarkan untuk usaha peternakan dan Percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya peternakan.

3.2.10. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- 1) Memberikan stimulan usaha bagi nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran

- ikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 2) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan serta pangkalan pendaratan ikan di kabupaten/kota se- Sumatera Utara;
 - 3) Pengembangan perikanan budidaya melalui percontohan dan penerapan teknologi cara budidaya yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik;
 - 4) Fasilitas dan pemenuhan kebutuhan BBM melalui solar Package Dealer nelayan pada sentra sentra nelayan secara memadai di wilayah pesisir;
 - 5) Fasilitas dan pembentukan pos pengawasan di pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan serta pemberdayaan Pokmaswas;
 - 6) Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam serta mitigasi bencana;
 - 7) Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 - 8) Meningkatkan produksi induk unggul dan benih berkualitas melalui pengembangan sarana dan prasarana unit pelaksana teknis daerah;
 - 9) Melakukan peningkatan kemampuan pengujian mutu hasil perikanan dan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan untuk menjaga mutu hasil perikanan;
 - 10) Mendorong pelaksanaan perencanaan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan jenis ikan yang dilindungi;
 - 11) Memperkuat pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang optimal.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 terdapat 4 Tujuan yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif
3. Meningkatkan Penguatan Infrastruktur
4. Pengoptimalan Reformasi Birokrasi

Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan dari pembangunan daerah secara khusus sektor pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya kelompok petani, penyuluh pertanian dalam peningkatan produksi hasil pertanian serta penanganan hama dan penyakit tanaman
2. terbatasnya komoditi pertanian unggulan yang dikelola oleh para kelompok tani
3. Menurunnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di kawasan yang berpotensi banjir

4. Terbatasnya variasi tanaman dan kualitas tanaman hasil kultur jaringan
5. Belum terintegrasinya penanganan pertanian dari hulu sampai hilir di kawasan kluster agrowisata terintegrasi
6. Belum optimalnya produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
7. Belum terkoordinirnya manajemen pemasaran hasil pertanian/peternakan/perikanan
8. Belum optimalnya penanganan permasalahan di lingkup petani karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyuluh pertanian
9. Kurangnya sumber daya manusia di dalam penanganan kesehatan dan penyakit hewan ternak
10. Masih terbatasnya pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan oleh petugas
11. Kurangnya pengetahuan peternak tentang kualitas/mutu pakan ternak
12. Kurangnya pengetahuan peternak dalam pengolahan dan pemasaran hasil ternak
13. Kurangnya petugas kesehatan hewan dan daging, sarana dan prasarana pendukung pada Rumah Potong Hewan
14. Tingginya biaya produksi budidaya ikan air tawar
15. Masih rendahnya nilai ekonomis hasil produksi perikanan
16. Kualitas SDM pembudidaya ikan, petugas pada bidang perikanan masih kurang
17. Belum optimalnya jumlah benih ikan yang dihasilkan di BBI
18. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan beragam, ber gizi, seimbang, dan aman
19. Belum adanya keseragaman harga produk pangan pokok lokal dengan daerah hinterland

3.4. Telaah RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2005-2025

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D ke-3, maka RPJM-D ke-4 ditujukan kepada perwujudan masyarakat kota yang cerdas dan bermartabat. Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJP-D ke 4 hendaknya tidak diukur dari jumlah lulusan pendidikan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak representatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari meningkatnya kerja produktif dalam sumberdaya ekonomi kota, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya ekonomi kota secara berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Tebing Tinggi menjadi 81, TPAK diperkirakan akan meningkat lebih dari 77% serta meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi lebih dari 12 tahun. Pada tahap ini, terciptanya good governance juga sudah harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara signifikan.

Sehubungan dengan itu pemanfaatan teknologi informasi juga sudah membudaya dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan pemerintahan utamanya dalam menjalankan pelayanan publik.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana pola ruang wilayah Kota Tebing Tinggi meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengertian kawasan lindung disini merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan pengertian kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi diwujudkan kedalam:

- Kawasan Lindung yang meliputi:
 - 1) Kawasan perlindungan setempat yakni sempadan sungai
 - 2) Kawasan RTH Kota
 - 3) Kawasan cagar budaya
 - 4) Kawasan rawan bencana alam
- Kawasan Budidaya yang meliputi:
 - 1) Kawasan Peruntukan Perumahan
 - 2) Kawasan Peruntukan Jasa Perdagangan
 - 3) Kawasan Peruntukan Jasa Perkantoran
 - 4) Kawasan Peruntukan Industri
 - 5) Kawasan Peruntukan Jasa Pariwisata
 - 6) Kawasan Peruntukan Pertanian
 - 7) Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau
 - 8) Kawasan Peruntukan ruang bagi Sektor Informal
 - 9) Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana
 - 10) Kawasan Peruntukan lainnya yang terdiri dari fasilitas pelayanan umum dan kawasan khusus (pertahanan dan keamanan)

Rencana pengembangan kawasan budidaya Wilayah Kota Tebing Tinggi meliputi:

- a. Memacu pertumbuhan kawasan jasa dan perdagangan dengan diarahkan pada SPPK termasuk percepatan pengembangan kawasan komersial terpadu di sekitar Terminal Bandar Kajum dan kawasan komersial terpadu yang potensial di PPK dan SPPK Tengah, Tenggara, Barat Daya dan Barat.

- b. Menetapkan sebagian besar tutupan lahan tegalan, kebun campur, sebagai kawasan pengembangana permukiman baru berupa Lingkungan Siap Bangun yang baru
- c. Mengembangkan permukiman orientasi vertikal terkait antisipasi perkuatan peran Kota Tebing Tinggi sebagai pintu terhadap Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi dan Bandara Kuala Namu yang meliputi pengembangan Rumah Susun Milik dan Sewa termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rengah (MBR)
- d. Mengendalikan potensi lahan sawah semi irigasi di Kelurahan Bulian dan Pinang Mancung melalui penetapan kawasan strategi kota agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
- e. Menetapkan potensi penetapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi penetapan jalur hijau pada kawasan sempadan sungai, jalur hijau sepanjang rel kereta api, pengalihan fungsi sarana olah raga yang kurang terpelihara dan pemeliharaan tempat pemakaman umum.
- f. Mengendalikan sebaran daerah industri yang sebahagian besar dekat dengan badan sungai secara ketat agar standar baku mutu air sungai dapat dipertahankan.
- g. Membatasi kegiatan pemanfaatan bahan galian C di Sub Wilayah Kota Barat dan mendorong pemanfaatan bahan galian C di Sub Wilayah Kota Utara

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pembangunan yang bias kepada ekonomi saja menimbulkan dampak lingkungan yang kurang terkendali. Kajian lingkungan hidup strategis dilakukan untuk meminimalisir dampak dari pembangunan yang selama ini diindikasi sebagai penyebab menimbulkan degradasi lingkungan. Analisis Kemampuan Lahan sesuai dengan KLHS Kemampuan lahan ditentukan oleh jenis tanah, kemiringan lahan, luas lahan, dan letak geografisnya. Jenis tanah akan menentukan tingkat kesuburan lahan yang tersedia sehingga dapat diusahakan untuk kegiatan tetnetu yang sesuai dengan kualitasnya. Kemiringan lahan terkait dengan perlakuan yang tepat sehingga kualitas dan fungsi lahan dapat lebih sesuai. Luas lahan terkait dengan pembagian zona pengembangan wilayah yang tepat agar suatu daerah dapat maju. Sedangkan letak geografisnya menentukan potensi dalam hal aksesibilitas untuk menyambungkan atau membangun koneksitas antar daerah dalam pembangunan. Jenis tanah yang ada di Kota Tebing Tinggi mrupakan karakter tanah hamper sama dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Tanah ini menurut struktur geologi merupakan formasi yang didominasi oleh

kelompok alluvial dan tufa toba, sehingga memiliki karakter subur untuk pengembangan pertanian karena merupakan endapan lumpur aliran sungai . Selain itu posisi Kota Tebing Tinggi merupakan wilayah yang didominasi oleh kawasan datar dan cekungan sungai. Kondisi tanah ini mempunyai sifat secara umum terlihat adanya lapisan-lapisan tanah yang berulang, tidak teratur yaitu tebal lapisan, jenis bahan penyusun tanah, warna, tekstur, struktur dan kandungan bahan organik yang sering berulang (tidak beraturan), lapisan yang berbeda tapi sifat dan jenis yang sama. Potensi ini sangat baik bagi pengembangan Kota Tebing Tinggi terutama dalam mendukung adanya pengembangan pertanian produktif untuk menjamin pasokan pangan daerah tersebut. Selain itu adanya beragam sungai yang mengalir di wilayah Tebing Tinggi memberikan potensi besar bagi perkembangan pasokan air untuk perkembangan pertanian maupun kebutuhan air lainnya. kelas kemiringan lereng berkisar antara 0-2% sedangkan topografi bergelombang berkisar antara 2-15 %. Kemiringan lereng relatif datar tersebut memberikan implikasi positif dalam pengembangan kegiatan ekonomi seperti kegiatan perdagangan, jasa, permukiman dan pertanian, penentuan pembangunan fisik kota, serta pengembangan sarana dan prasarana kota. Sedangkan pada kelas kemiringan lereng 0-2 % perlu mendapat perhatian khusus akan kemungkinan banjir dikemudian hari. Hal ini perlu dicegah dengan menerapkan aturan ketat dalam penggunaan lahan dikemiringan tersebut. Letak Kota Tebing Tinggi berada dataran rendah yang dikelilingi oleh Perkebunan BUMN dan swasta. Selain itu Kota Tebing Tinggi merupakan wilayah yang menghubungkan jalur lintas timur Sumatra ke wilayah di sekitarnya. Sehingga wilayah ini sangat cocok terhadap perkembangan kota jasa dan perdagangan. Luas wilayah Kota Tebing Tinggi mencapai Wilayah datar ini merupakan bagian terluas mencapai luas 3.843,80 hektar atau 38,438 km². Areal lahan ini telah secara maksimum digunakan sebagai permukiman, sarana public, Jalan dan jalur kereta api, pertanian, industry, semak belukar dan rawa-rawa. Kecamatan Padang Hilir merupakan kecamatan yang terluas dengan luas 11.411 km² atau 29,76% dari luas Kota Tebing Tinggi. Sebagian besar (50,86%) lahan di Kota Tebing Tinggi digunakan sebagai lahan pertanian. wilayah Kota Tebing Tinggi. Letak Kecamatan Padang Hulu berada pada arah Selatan menuju kota Pematang Siantar. Keadaan topografi Padang Hulu sedikit bergelombang dibandingkan kecamatan lainnya.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah

dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

3.5.1. Internasional

- 1) Ketidakpastian Global
- 2) Pertumbuhan Ekonomi yang stagnan
- 3) Defisit transaksi yang berjalan
- 4) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

3.5.2. Nasional

Isu-isu dalam pembangunan ekonomi dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang
- 2) Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.
- 3) transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis
- 4) era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan

3.5.3. Provinsi

Salah satu isu strategis dalam perubahan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera adalah isu strategis agraris yakni terbatasnya sarana dan prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan produksi ternak sapi dan domba, mempertahankan swasembada komoditas pangan beras dan jagung, peningkatan produksi cabe merah, bawang merah dan bawang putih serta peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai upaya peningkatan daya saing sektor agraris yang lebih baik.

Yang menjadi Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara adalah:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lahan
- 2) Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat Belum Mencukupi Kebutuhan
- 3) Pemanfaatan Ketersediaan Air

- 4) Ketersediaan Saprodi Dan Alsintan Masih Terbatas
- 5) Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
- 6) SDM Pertanian Masih Relatif Rendah

3.5.4. Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia
- b. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah
- c. Percepatan penanggulangan Kemiskinan
- d. Implementasi Reformasi Birokrasi
- e. Peningkatan Daya Saing perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi kreatif
- f. Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pelestarian Lingkungan Hidup
- g. Perwujudan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Budaya Daerah
- h. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM
- i. Penanganan dan Pemulihan COVID-19 di Kota Tebing Tinggi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia aparatur
2. Keterbatasan lahan pertanian
3. Biaya produksi pertanian,perikanan dan peternakan serta derivat turunannya yang tinggi
4. Peningkatan SDM pelaku usaha sector pertanian,perikanan,peternakan serta derivat turunannya
5. Keterbatasan pemasaran hasil usaha sector pertanian,perikanan,peternakan serta derivatnya
6. Peningkatan penerapan teknologi pertanian,peternakan,perikanan dan derivat turunannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan pertanian secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis.

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tebing Tinggi, digunakan pendekatan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Selain itu juga dilakukan pendekatan integratif dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan empat tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

4.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian jangka waktu 3 (tiga) Tahun dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPD Kota Tebing Tinggi, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi telah menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif
2. Pengoptimalan Reformasi Birokrasi

4.2. Sasaran

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan sektor ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran Renstra selain menerjemahkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPD periode berkenaan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi telah menetapkan sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan
2. Meningkatnya Investasi
3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
4. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dilakukan dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan erah Kota Tebing Tinggi periode 2023-2026 kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 terkait Tugas Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Kota Tebing Tinggi. Adapun tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi disajikan pada tabel 4.2.1. berikut ini:

Tabel 4.2.1.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	82	82	83
2	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan	Produktivitas tanaman Padi (Kw/ha)	68	69	69	70
			Produktivitas tanaman jagung (Kw/ha)	53	54	55	57
			Produktivitas tanaman Ubi kayu (Kw/ha)	470	471	472	473
			Produktivitas tanaman Cabe (Kw/ha)	50	52	54	56
			Produktivitas tanaman Bawang Merah (Kw/ha)	50	53	55	60
			Jumlah produksi tanaman Padi (Kw/ha)	31.319,44	31.780,02	31.780,02	32.240,60
			Jumlah produksi tanaman jagung (Kw/ha)	292	297	303	314
			Jumlah produksi tanaman Ubi kayu (Kw/ha)	98.700	97.968	97.222	96.492
			Jumlah produksi tanaman Cabe (Kw/ha)	100	104	108	112
			Jumlah produksi tanaman Bawang Merah (Kw/ha)	150	159	165	180
			Jumlah produksi tanaman Sayur sayuran (Kw/ha)	4.000	4.200	4.500	5.000
Jumlah produksi ikan (Ton)	4.361,84	4.579,93	4.808,93	5.049,38			

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah produksi benih ikan (Ekor)	7.032.100	7.454.000	7.901.200	8.375.200
			Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	592,20	621,80	652,82	684,85
			Jumlah Produksi Olahan Hasil Ternak - Susu (liter)	33.000	36.000	38.000	40.800
			Jumlah Produksi Olahan Hasil Ternak - Daging Sapi (Ton)	182	184	186	190
			Jumlah Produksi Olahan Hasil Ternak - Daging Kambing/Domba (Ton)	93	96	98	99
			Panjang Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi yang dibangun/direhab (Km)	1,5	1,5	2	2
			Panjang Sarana dan Prasarana Irigasi yang dibangun/direhab (Km)	1	1	1,5	2
		Meningkatnya Investasi	Jumlah rekomendasi Izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha sektor pertanian,perikanan, peternakan dan deripat turunannya	2	2	3	3
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Nilai)	82	83	84	85
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Nilai)	78	78,5	79	79,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, maka diperlukan suatu strategi pembangunan serta kebijakan pembangunan yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2023-2026. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka diperlukan strategi pembangunan dan arah kebijakan dalam jangka waktu 4 tahun kedepan dapat digambarkan dalam Tabel 5.1.1 di bawah ini :

Tabel 5.1.1

Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah
Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan	Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif yang Terintegras	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
	Meningkatnya Investasi	Mempermudah Perizinan	Pelayanan Perizinan Terintegrasi
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Renstra Tahun 2023-2026. Adapun penyajiannya dapat dilihat pada Tabel 6.1.1.

Tabel 6.6.1.
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, DAN PENDANAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel																	
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana			10.735.951.700		11.508.489.280		12.522.000.000		13.103.000.000		47.869.440.980			
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.995.800		24.195.380		26.500.000		28.000.000		100.691.180			

		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	21.995.800	12 Laporan	24.195.380	12 Laporan	26.500.000	12 Laporan	28.000.000	48 Laporan	100.691.180	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.157.316.000		7.583.047.600		8.000.000.000		8.500.000.000		31.240.363.600		
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 org/bulan	70 org/bulan	7.157.316.000	75 org/bulan	7.583.047.600	80 org/bulan	8.000.000.000	85 org/bulan	8.500.000.000	310 org/bulan	31.240.363.600	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				70.000.000		78.000.000		85.000.000		100.000.000		333.000.000		
		01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	70.000.000	1 paket	78.000.000	1 paket	85.000.000	1 paket	100.000.000	4 paket	333.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			746.639.900		803.246.300		828.500.000		935.000.000		3.313.386.200			
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	18.839.900	1 paket	20.723.800	1 paket	23.000.000	1 paket	25.000.000	4 paket	87.563.700	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	145.000.000	1 paket	160.000.000	1 paket	165.000.000	1 paket	175.000.000	4 paket	645.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	205.300.000	1 paket	207.500.000	1 paket	209.500.000	1 paket	210.000.000	4 paket	832.300.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.500.000	1 paket	22.522.500	1 paket	23.000.000	1 paket	25.000.000	4 paket	91.022.500	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 paket	1 paket	7.000.000	1 paket	7.500.000	1 paket	8.000.000	1 paket	85.000.000	4 paket	107.500.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

				Undangan yang Disediakan													
		01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	385.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	415.000.000	48 Laporan	1.550.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				365.000.000		420.000.000		470.000.000		520.000.000		1.775.000.000		
		01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 unit	3 unit	100.000.000	3 unit	120.000.000	3 unit	140.000.000	3 unit	160.000.000	12 unit	520.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	3 unit	100.000.000	3 unit	120.000.000	3 unit	140.000.000	3 unit	160.000.000	12 unit	520.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2 unit	2 unit	165.000.000	2 unit	180.000.000	2 unit	190.000.000	2 unit	200.000.000	8 unit	735.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

				Lainnya yang Disediakan													
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.945.000.000		2.134.000.000		2.410.000.000		2.278.000.000		8.767.000.000		
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	220.000.000	12 Laporan	238.000.000	12 Laporan	240.000.000	12 Laporan	250.000.000	48 Laporan	948.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	26.000.000	12 Laporan	270.000.000	12 Laporan	28.000.000	48 Laporan	349.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.700.000.000	12 Laporan	1.870.000.000	12 Laporan	1.900.000.000	12 Laporan	2.000.000.000	48 Laporan	7.470.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				430.000.000		466.000.000		702.000.000		742.000.000		2.340.000.000		

			Pemerintah Daerah														
		01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	16 unit	133.000.000	18 unit	145.000.000	18 unit	155.000.000	18 unit	170.000.000	70 unit	603.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 Unit	50.000.000	10 Unit	55.000.000	10 Unit	57.000.000	10 Unit	59.000.000	40 unit	221.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	42.000.000	12 unit	45.000.000	12 unit	50.000.000	12 unit	53.000.000	46 unit	190.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4 unit	190.000.000	4 unit	21.000.000	4 unit	220.000.000	4 unit	230.000.000	16 unit	661.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

		01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	15.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	220.000.000	2 unit	230.000.000	8 unit	665.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan																
		3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				425.000.000		502.000.000		590.800.000		692.960.000		2.210.760.000		
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				105.000.000		118.000.000		130.000.000		140.000.000		493.000.000		
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	88.000.000	2 Laporan	95.000.000	2 Laporan	100.000.000	8 Laporan	363.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

		3.27.02.2.0 1.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		1 laporan	25.000.000	1 laporan	30.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	4 Laporan	130.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.02.2.0 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota				100.000.000		120.000.000		144.000.000		172.800.000		536.800.000		
		3.27.02.2.0 2.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		1 laporan	100.000.000	1 laporan	120.000.000	1 laporan	144.000.000	1 laporan	172.800.000	4 Laporan	536.800.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.02.2.0 3	Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota				60.000.000		72.000.000		86.400.000		103.680.000		322.080.000		
		3.27.02.2.0 1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit		1 laporan	30.000.000	1 laporan	36.000.000	1 laporan	43.200.000	1 laporan	51.840.000	4 laporan	161.040.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

			Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil													
		3.27.02.2.02.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar		1 laporan	30.000.000	1 laporan	36.000.000	1 laporan	43.200.000	1 laporan	51.840.000	4 Laporan	161.040.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di tingkat pengecer				30.000.000		36.000.000		43.200.000		51.840.000		161.040.000		
		3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar		1 laporan	30.000.000	1 laporan	36.000.000	1 laporan	43.200.000	1 laporan	51.840.000	4 Laporan	161.040.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan pengawasan Penyediaan dan Peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam kabupaten/kota				60.000.000		72.000.000		86.400.000		103.680.000		322.080.000		

		3.27.02.2.0 5.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar		1 laporan	30.000.000	1 laporan	36.000.000	1 laporan	43.200.000	1 laporan	51.840.000	4 Laporan	161.040.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.02.2.0 5.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar		1 laporan	30.000.000	1 laporan	36.000.000	1 laporan	43.200.000	1 laporan	51.840.000	4 Laporan	161.040.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.02.2.0 6	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota lain				70.000.000		84.000.000		100.800.000		120.960.000		375.760.000		
		3.27.02.2.0 6.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain		1 laporan	50.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	72.000.000	1 laporan	86.400.000	4 Laporan	268.400.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.02.2.0 6.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain		1 laporan	20.000.000	1 laporan	24.000.000	1 laporan	28.800.000	1 laporan	34.560.000	4 Laporan	107.360.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan	Jumlah pencegahan dan pengobatan penyakit			230.000.000		276.000.000		331.200.000		397.440.000		1.234.640.000		

			dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	hewan dan peningkatan produk asal hewan yang ASUH													
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota				200.000.000		240.000.000		288.000.000		345.600.000		1.073.600.000		
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		1 laporan	200.000.000	1 laporan	240.000.000	1 laporan	288.000.000	1 laporan	345.600.000	4 Laporan	1.073.600.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				30.000.000		36.000.000		43.200.000		51.840.000		161.040.000		
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk		1 laporan	15.000.000	1 laporan	18.000.000	1 laporan	21.600.000	1 laporan	25.920.000	4 Laporan	80.520.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

				Hewan													
		3.27.04.2.0 4.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		1 laporan	15.000.000	1 laporan	18.000.000	1 laporan	21.600.000	1 laporan	25.920.000	4 Laporan	80.520.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya jumlah produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura			251.350.000		285.000.000		310.000.000		335.000.000		1.181.350.000		
		3.27.05.2.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota				251.350.000		285.000.000		310.000.000		335.000.000		1.181.350.000		
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	0	15 Ha	50.000.000	20 Ha	60.000.000	25 Ha	65.000.000	35 Ha	70.000.000	95 Ha	245.000.000		

			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani	51 Ha	51 Ha	156.350.000	51 Ha	170.000.000	51 Ha	180.000.000	51 Ha	190.000.000	204 Ha	696.350.000		
		3.27.05.2.0 1.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	75.000.000	4 Laporan	240.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kelembagaan penyuluh dan petani			1.157.732.900		1.293.642.000		1.320.000.000		1.347.000.000		542.077.200		
		3.27.07.2.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.157.732.900		1.293.642.000		1.320.000.000		1.347.000.000		542.077.200		
		3.27.07.2.0 1.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan		1 Unit	114.577.200	1 Unit	137.500.000	1 Unit	140.000.000	1 Unit	150.000.000	4 Unit	542.077.200	DKPP	Kota Tebing Tinggi

			n Kapasitas ya													
	3.27.07.2.0 1.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Unit	276.427.700	1 Unit	332.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	365.000.000	4 Unit	1.323.427.700	DKPP	Kota Tebing Tinggi
	3.27.07.2.0 1.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		1 Unit	716.728.000	1 Unit	764.142.000	1 Unit	765.000.000	1 Unit	766.000.000	4 Unit	3.011.870.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
	3.27.07.2.0 1.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang terbentuk dan beroperasi		1 Unit	50.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	65.000.000	1 Unit	66.000.000	4 Unit	241.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi ikan			582.000.000		670.000.000		765.000.000		865.000.000		2.882.000.000		
	3.25.04.2.0 2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				300.000.000		350.000.000		400.000.000		440.000.000		1.490.000.000		

		3.25.04.2.0 2.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	3 Kelompok	10 Kelompok	300.000.000	10 Kelompok	350.000.000	10 Kelompok	400.000.000	10 Kelompok	440.000.000	40 Kelompok	1.490.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.25.04.2.0 4	Pengelolaan Pembudidaya Ikan				282.000.000		320.000.000		365.000.000		425.000.000		1.392.000.000		
		3.25.04.2.0 4.02	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	300.000.000	4 Unit	970.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.25.04.2.0 4.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	10 Dokumen	20 Dokumen	32.000.000	15 Dokumen	40.000.000	15 Dokumen	45.000.000	15 Dokumen	50.000.000	65 Dokumen	167.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.25.04.2.0 4.05	Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di darat	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan	30 Orang	200 Orang	50.000.000	200 Orang	60.000.000	200 Orang	70.000.000	200 Orang	75.000.000	800 Orang	255.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

				dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat													
		3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase meningkatnya pelaku usaha pengolahan hasil produksi perikanan			180.000.000		220.000.000		250.000.000		280.000.000		930.000.000		
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		180.000.000			
		3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil	1 Kelompok		30.000.000	3 Kelompok	40.000.000	3 Kelompok	50.000.000	3 Kelompok	60.000.000	12 Kelompok	180.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

				perikanan sesuai skala usaha dan risiko													
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				150.000.000		180.000.000		200.000.000		220.000.000		750.000.000		
		3.25.06.2.03.02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro an kecil yang akan mendapatkan fasilitas (bahan baku industri pengolahan ikan)	1 Kelompok	2 Kelompok	150.000.000	2 Kelompok	180.000.000	2 Kelompok	200.000.000	2 Kelompok	220.000.000	8 Kelompok	750.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatn ya sarana dan prasarana pertanian			1.490.000.000		2.232.000.000		2.615.000.000		3.218.000.000		9.555.000.000		
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				1.490.000.000		2.232.000.000		2.615.000.000		3.218.000.000		9.555.000.000		

		3.27.03.2.0 2.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara		1 unit	600.000.000	1 unit	800.000.000	1 unit	800.000.000	1 unit	1.000.000.000	4 unit	3.200.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.03.2.0 2.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	600.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.200.000.000	4 unit	3.600.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.03.2.0 2.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	0	1 Unit	220.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	400.000.000	4 unit	920.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.03.2.0 2.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		5 Unit	10.000.000	5 Unit	12.000.000	5 Unit	15.000.000	5 Unit	18.000.000	20 unit	55.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.03.2.0 2.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	1 unit	280.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	350.000.000	1 unit	400.000.000	4 unit	1.330.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		3.27.03.2.0 2.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukung		1 Unit	0	1 Unit	100.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	200.000.000	4 unit	450.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

			Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	nya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipeliharanya												
	Meningkatnya Investasi															
		3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya penilaian dan pembinaan izin untuk petani			285.000.000		310.000.000		335.000.000		360.000.000		1.290.000.000	
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			285.000.000	-	310.000.000	-	335.000.000	-	360.000.000	-	1.290.000.000		
		3.27.06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Pemberian Izin Usaha Pertanian Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	0	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	310.000.000	DKPP Kota Tebing Tinggi
		3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Usaha Pertanian	0	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	340.000.000	DKPP Kota Tebing Tinggi

		3.27.06.2.0 1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	0	2 Laporan	145.000.000	2 Laporan	155.000.000	2 laporan	165.000.000	2 Laporan	175.000.000	8 Laporan	640.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat																	
		2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan kemandirian Pangan	Terpenuhiya ketersediaan pangan			50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		250.000.000		
		2.09.02.2.0 1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		250.000.000		
		2.09.02.2.0 1.05	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	0	1 laporan	50.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	70.000.000	4 laporan	250.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

		2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi			1.290.150.000		1.368.050.000		1.485.640.000		1.691.687.000		5.835.527.000		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				680.150.000		765.050.000		870.920.000		1.004.051.000		3.320.171.000		
		2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Laporan	3 Laporan	65.000.000	3 Laporan	70.000.000	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	290.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	227.000.000	1 Laporan	295.100.000	1 Laporan	383.630.000	1 Laporan	498.719.000	4 Laporan	1.404.449.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi	0	4 Laporan	6.000.000	4 Laporan	7.800.000	4 Laporan	10.140.000	4 Laporan	13.182.000	4 Laporan	37.122.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

			i dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	i dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya													
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	6 Dokumen	12 Dokumen	382.150.000	12 Dokumen	392.150.000	12 Dokumen	402.150.000	12 Dokumen	412.150.000	12 Dokumen	1.588.600.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota				140.000.000		155.000.000		170.000.000		185.000.000		650.000.000		
		2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	0	8 ton	110.000.000	9 ton	120.000.000	10 ton	130.000.000	11 ton	140.000.000	38 ton	500.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara	0	8 ton	30.000.000	9 ton	35.000.000	10 ton	40.000.000	11 ton	45.000.000	38 ton	150.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah				60.000.000		60.000.000		8.320.000		10.816.000		30.436.000		

			Pusat dan Pemerintah Provinsi														
		2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	8.320.000	1 Laporan	10.816.000	4 Laporan	30.436.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				410.000.000		388.000.000		436.400.000		491.820.000		1.726.220.000		
		2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	78.000.000	1 Dokumen	101.400.000	1 Dokumen	131.820.000	4 Dokumen	371.220.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1 Laporan	1 Laporan	320.000.000	1 Laporan	270.000.000	1 Laporan	290.000.000	1 Laporan	310.000.000	4 Laporan	1.190.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

			Daya Lokal	Berbasis Sumber Daya Lokal													
		2.09.03.2.0 4.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	50.000.000	4 Laporan	165.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Teridentifikasi jumlah zona tahan pangan dan rentan pangan			120.000.000		135.000.000		145.000.000		155.000.000		555.000.000		
		2.09.04.2.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				90.000.000		95.000.000		100.000.000		105.000.000		390.000.000		
		2.09.04.2.0 1.01	Penyusunan , Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	0	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	95.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	105.000.000	8 Dokumen	390.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		2.09.04.2.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/				30.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		165.000.000		

			Kota														
		2.09.04.2.0 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	0	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	50.000.000	4 Laporan	165.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
		2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan			110.000.000		120.000.000		135.000.000		155.000.000		520.000.000		
		2.09.05.2.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota				110.000.000		120.000.000		135.000.000		155.000.000		520.000.000		
		2.09.05.2.0 1.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	235.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi

		2.09.05.2.0 1.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	285.000.000	DKPP	Kota Tebing Tinggi
--	--	---------------------	---	---	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-------------	------	--------------------

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 4(empat) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 pada Tabel 7.1.1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dibawah ini:

Tabel 7.1.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	9	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	81	82	82	83	83	
2	Produktivitas tanaman Padi (Kw/ha)	68	68	69	69	70	70	
3	Produktivitas tanaman jagung (Kw/ha)	52	53	54	55	57	57	
4	Produktivitas tanaman Ubi kayu (Kw/ha)	469	470	471	472	473	473	
5	Produktivitas tanaman Cabe (Kw/ha)	48	50	52	54	56	52	
6	Produktivitas tanaman Bawang Merah (Kw/ha)	48	50	53	55	60	53,2	
7	Jumlah produksi tanaman Padi (Kw/ha)	31319,44	31.319,44	31.780,02	31.780,02	32.240,60	417.120,08	
8	Jumlah produksi tanaman jagung (Kw/ha)	286	292	297	303	314	1.206	
9	Jumlah produksi tanaman Ubi kayu (Kw/ha)	98.490	98.700	97.968	97.232	96.492	390.392	
10	Jumlah produksi tanaman Cabe (Kw/ha)	96	100	104	108	112	424	
11	Jumlah produksi tanaman Bawang Merah (Kw/ha)	144	150	159	165	180	654	
12	Jumlah produksi tanaman Sayur sayuran (Kw/ha)	3950	4.000	4.200	4.500	5.000	17.700	
13	Jumlah produksi ikan (Ton)	3.927,20	4.361,84	4.579,93	4.808,93	5.049,38	18.800,08	
14	Jumlah produksi benih ikan (Ekor)	6.634.170	7.032.100	7.454.000	7.901.200	8.375.200	30.762.500	

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9
15	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanaan (Ton)	564,05	592,20	621,80	652,82	684,85	2.551,67
16	Jumlah Produksi Olahan Hasil Ternak - Susu (liter)	22.600	33.000	36.000	38.000	40.800	34.080
17	Jumlah Produksi Olahan Hasil Ternak - Daging Sapi (Ton)	160	182	184	186	190	742
18	Jumlah Produksi Olahan Hasil Ternak - Daging Kambing/domba (Ton)	88	93	96	98	99	386
19	Panjang Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi yang dibangun/direhab (Km)	10,443	1,5	1,5	2	2	7
20	Panjang Sarana dan Prasarana Irigasi yang dibangun/direhab (Km)	18,669	1	1	1,5	2	5,5
21	Skor pola pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Nilai)	75,89	82	83	84	85	85
22	Skor pola pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Nilai)	81	78	78,5	79	79,5	79,5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 4 (empat) tahun yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, program serta kegiatan prioritas. Dokumen Rencana Strategis merupakan panduan bagi pihak yang terkait untuk menghasilkan rancangan program dan kegiatan yang konsisten sesuai sasaran kinerja yang ditetapkan, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan standart rencana kerja serta evaluasi selama tahun 2023-2026. Implementasi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Menyadari bahwa pencapaian pembangunan ketahanan pangan dan peternakan tidaklah mudah, maka dengan tekad dan integritas para penyelenggara di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi disertai dengan intensitas koordinasi dengan pelaksana pembangunan baik di pusat maupun di provinsi, maka tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan dan peternakan akan dapat tercapai.